

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Arus globalisasi yang pesat secara langsung mendorong individu untuk meningkatkan kualitas diri salah satunya dengan mengandalkan pendidikan. Pendidikan terutama dalam literasi dan numerasi menjadi sebuah fondasi awal untuk menunjang kehidupan manusia. Literasi dan numerasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola serta memahami berbagai pengetahuan melalui proses membaca, menulis, dan menghitung (Worowirastri & Suwandayani, 2019). Melalui kemampuan literasi dan numerasi dasar, secara langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu bersaing di tingkat global. Dalam prakteknya, pendidikan berkontribusi juga dalam perkembangan psikologi, sosial dan budaya didalam masyarakat (McGrath, 2018). Melalui aspek ini, seseorang dapat menunjang kehidupannya terlebih pada era globalisasi yang mengandung tantangan-tantangan baru yang memaksa perubahan pengelolaan hidup dan masyarakat salah satunya dalam bidang pendidikan (Oktarina, 2007). Pendidikan juga diyakini memegang peranan penting terhadap keberhasilan pembangunan nasional suatu negara. Kualitas pendidikan yang baik secara langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang di hasilkan. Dengan itu, potensi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi yang nantinya dapat mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan dan gizi, serta meminimalisir ketimpangan sosial (Wagner, 2017).

Dewasa ini, persaingan kualitas sumber daya manusia sangatlah ketat. Dengan cepatnya arus globalisasi, batas-batas negara menjadi samar, terlebih pasar bebas menjadi *trend* yang diterapkan diwilayah regional. Seperti yang kita ketahui, pasar bebas ini bukanlah hanya soal barang, tetapi juga jasa. Dengan adanya pasar bebas, suatu bangsa cenderung dituntut untuk dapat bersaing dengan bangsa yang lain untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Pasar bebas akan sangat menguntungkan bagi negara yang memiliki sumber daya manusia berkualitas tinggi, sebaliknya hanya akan merugikan bagi negara dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Indonesia misalnya, dengan adanya

Masyarakat Ekonomi Asean yang merupakan pasar tunggal dikawasan Asia Tenggara, Indonesia diharuskan bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (Edu, Arifian, & Nardi, 2016). Dalam hal ini, Indonesia masih tertinggal jauh soal kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu, peran pendidikan menjadi sangat penting untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia di Indonesia.

Di Indonesia, pendidikan telah menjadi fokus utama pemerintah bahkan jauh sebelum permasalahan-permasalahan diatas muncul. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea ke-4 menyebutkan bahwa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu cita-cita bangsa. Hal ini, menjadi sebuah pesan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk memfasilitasi sistem, sarana dan prasarana, serta penjaminan pemerataan institusi pendidikan yang bermutu sebagai upaya menghadapi tantangan baru di masa depan. Selain terkandung dalam UUD 1945, tujuan pendidikan juga dibahas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan dan pendidikan karakter serta mengembangkan potensi siswa untuk dapat hidup secara mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab (Kemendikbud, 2003).

Dengan ketetapan dasar-dasar hukum diatas, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin terlaksananya seluruh sistem pendidikan formal secara merata dan menyeluruh. Dengan itu, pemerintah telah berupaya meningkatkan kuantitas institusi pendidikan untuk menunjang tingginya angka kebutuhan terhadap pendidikan. Sayangnya, peningkatan kuantitas institusi pendidikan di Indonesia belum mampu untuk menjawab permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang diakibatkan dari rendahnya mutu pendidikan hal ini dapat dibuktikan melalui tingginya tingkat buta huruf dan buta angka pada masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut didorong oleh faktor-faktor lain seperti sistem pendidikan, akses, hingga angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia membuat banyak dari masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan.

Sebagai respon dari permasalahan diatas, pada 2005 pemerintah telah memberikan subsidi dana melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga beasiswa-beasiswa bagi siswa yang kurang mampu untuk memastikan setiap kalangan masyarakat Indonesia dapat menempati bangku sekolah dasar dan sekolah menengah hingga

menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Dalam 15 tahun terakhir, anggaran belanja pemerintah dalam bidang pendidikan telah meningkat dua kali lipat dan angka partisipasi siswa pada jenjang sekolah dasar meningkat secara signifikan (INOVASI, 2016). Pemerintah juga telah merubah kurikulum nasional yang menjadi landasan sistem pendidikan untuk memastikan setiap daerah mendapatkan pemerataan kualitas pendidikan seperti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 yang berfokus pada penyesuaian kondisi dan potensi suatu daerah serta peserta didiknya (Hardiansyah, 2020).

Sayangnya, peningkatan partisipasi siswa dalam institusi pendidikan dan pembaharuan kurikulum di Indonesia belum mampu membawa Indonesia mencapai rata-rata nilai yang dihimpun dalam Program PISA. *Programme for International Student Assessment* (PISA), digagas oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang dirancang untuk mengukur kemampuan anak berumur 15 tahun dalam pengetahuan dan keterampilan membaca, matematika, dan sains untuk memenuhi tantangan kehidupan dimasa depan (OECD, n.d.). Sejak diadakan pada tahun 2000, peringkat Indonesia hanya berada pada kisaran 370-400 yang menunjukkan bahwa Indonesia masih berada jauh dibawah nilai rata-rata OECD yang berada diangka 500 (Harususilo, 2019).

Disamping itu, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan ketimpangan fasilitas, sistem, dan mutu dari pendidikan di berbagai daerah. Permasalahan ini dipicu oleh sistem pemerintahan terdahulu yang sentralistik serta kurangnya sumber daya baik modal maupun manusia yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Indonesia Timur. Hal ini dapat dibuktikan melalui data statistik yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik mengenai tingkat persentase buta huruf yang di data perprovinsi, menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat jelas perihal kualitas institusi pendidikan di kawasan Indonesia barat dan timur. Kawasan Indonesia timur memiliki tingkat persentase buta huruf yang sangat tinggi, bahkan di beberapa provinsi kawasan timur Indonesia, angka persentase buta huruf terlihat sangat memprihatinkan.

Dengan adanya tuntutan dan kepentingan diatas, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Australia melalui INOVASI fase pertama yang digagas pada tahun

2016 dan berakhir pada tahun 2019. *Innovation for Indonesia's School Children* (INOVASI) merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia yang bekerja langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan hasil belajar serta kemampuan siswa dalam Literasi dan Numerasi siswa-siswa sekolah dasar khususnya pada 17 kabupaten/kota yang tersebar di 4 provinsi di Indonesia yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur (INOVASI, 2016).

Australia dianggap mampu untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dalam hal literasi dan numerasi siswa sekolah dasar. Hal ini dikarenakan Australia memiliki sejumlah sistem pendidikan yang mendukung peningkatan tingkat literasi dan numerasi, seperti *National Assessment Program – Literacy and Numeracy* (NAPLAN), *Progress in International Reading Literacy Study* (PRILS), *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) (AIHW, 2020). Sistem-sistem tersebut kemudian menjadi acuan kompetensi siswa sekolah dasar dalam literasi dan numerasi, yang secara langsung meningkatkan standar kualitas institusi pendidikan dan berimbas pada peningkatan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar di Australia.

Sejak dilaksanakan pada 2008, Australia berhasil meningkatkan angka literasi dan numerasi pada anak umur 5 tahun yang mencapai rata-rata dan diatas rata-rata standar nasional sebanyak 4% pada literasi dan 3% pada numerasi per 2018 (AIHW, 2020). Pemerintah Australia memulai serangkaian tes yang menentukan standar nasional dalam literasi dan numerasi sejak anak usia 3 tahun, hal ini mendorong peran institusi pendidikan dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa untuk mencapai standar nasional (Westwood, 2008). Bila dibandingkan dengan keadaan di Indonesia khususnya pada 4 provinsi mitra INOVASI dimana siswa sekolah dasar kelas 1-3 kisaran umur 6-9 tahun masih belum menguasai keahlian membaca, menulis, dan berhitung (Harususilo, 2019). Oleh karenanya kerjasama INOVASI yang memfokuskan peningkatan hasil pembelajaran pada siswa sekolah dasar dalam literasi dan numerasi sangat dibutuhkan. Mengingat tingkat buta huruf dan buta angka di keempat provinsi masih terbilang cukup tinggi.

Tabel I.1.1. Presentase Penduduk 15+ Buta Huruf (Persen) Pada Provinsi Mitra
INOVASI

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
Jawa Timur	8.53	8.41	8.18	8.15	7.68
Kalimantan Utara	5.01	4.95	4.86	4.82	3.61
Nusa Tenggara Barat	13.03	12.94	12.86	12.58	12.41
Nusa Tenggara Timur	8.55	8.84	8.32	8.10	6.76

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2019).

Dari tabel diatas, dapat terlihat persentase buta huruf yang masih tinggi di provinsi-provinsi mitra INOVASI. Permasalahan ini kemudian menjadi urgensi dari pelaksanaan kerjasama antara Indonesia-Australia dalam bidang pendidikan melalui INOVASI fase pertama yang digagas pada 2016.

Kemitraan ini ditujukan untuk menunjang sistem pendidikan yang efektif dan efisien di tingkat daerah untuk memperbaiki serta meningkatkan hasil pembelajaran melek huruf dan melek angka melalui solusi interasional yang diserap pada konteks lokal, untuk dapat merancang dan menguji solusi internasional melalui serangkaian percontohan sebagai upaya mendapatkan sistem pembelajaran yang efektif (INOVASI, 2016). Sejak 2016, INOVASI telah berkolaborasi dengan LSM dan organisasi kemasyarakatan berupa bantuan dana hibah dan kemitraan belajar guna memperbaiki kualitas sistem pendidikan yang sesuai dengan daerah tersebut.

Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi terbesar ke-13 di Indonesia merupakan mitra pertama program INOVASI fase pertama yang terjalin pada tahun 2016-2019. Dari 4 provinsi mitra program INOVASI, Nusa Tenggara Barat memiliki persentase buta huruf yang paling tinggi yakni diatas 10%. Pemerintah Australia melalui *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) memilih 6 Kabupaten dari 10 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat untuk menjadi mitra pertama program INOVASI. Meskipun angka partisipasi siswa meningkat serta angka putus sekolah yang rendah, nyatanya tidak bisa menjamin siswa-siswa sekolah khususnya sekolah dasar dapat belajar secara efektif. Rendahnya kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat, menyebabkan rata-rata nilai ujian nasional sekolah dasar tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sumbawa dengan nilai 58/100 pada tahun 2015 atau sebelum terjalin kemitraan INOVASI (INOVASI, 2016). Dapat disimpulkan bahwa Nusa Tenggara Barat berada jauh tertinggal bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Seiring dengan terbentuknya *Sustainable Development Goals* pada tahun 2015 yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan agenda pembangunan yang mengedepankan kemaslahatan manusia, Pemerintah Indonesia dituntut untuk mengatasi segala permasalahan diatas dan mengupayakan pencapaian tujuan 4 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki tujuan “*to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all*” (SDGs, 2015). Pentingnya pencapaian tujuan 4 ini didorong oleh peran pendidikan dalam SDGs yang cukup signifikan, peningkatan kualitas pendidikan secara langsung dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang (Stephanie, Bengtsson, Barakat, & Muttarak, 2018). Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa pencapaian target lain dapat tercapai melalui perbaikan kualitas di sektor pendidikan.

Di Indonesia sendiri, untuk memastikan pendidikan berkualitas, merata serta memberikan kesempatan belajar seumur hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah Indonesia perlu mengupayakan suatu hal yang dapat meningkatkan sektor pendidikan Indonesia baik dari fasilitas bangunan sekolah, sistem pendidikan untuk menghasilkan hasil belajar yang maksimal, hingga sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik yang memadai. Lalu kerjasama Indonesia-Australia melalui INOVASI dijadikan sebagai sebuah rencana aksi yang akan digunakan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, yang kemudian dapat menjadi instrumen Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam SDGs Tujuan 4.

Sejak berjalan pada tahun 2016, kerjasama ini nyatanya belum memberikan hasil yang signifikan. Masih terjadi banyak ketimpangan dalam kualitas intitusi pendidikan terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari data persentase buta huruf yang masih diatas 10%. Padahal kemitraan INOVASI telah terjalin satu periode sejak 2016 hingga saat ini. Penurunan tingkat buta huruf di Nusa Tenggara Barat cenderung lamban dan pada tahun terjalinnya kemitraan INOVASI (2016-2019), tingkat buta huruf di Nusa Tenggara Barat tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, Dihimpun dari Badan Pusat Statistik, persentase buta huruf anak usia 15 tahun pada tahun 2016 sebesar 12,94%; 2017 sebesar 12,86%; 2018 sebesar 12,58%; dan 2019 sebesar 12,41% hasil ini menunjukkan jumlah yang cenderung stagnan (BPS, 2019).

Peringkat skor hasil PISA 2018 yang dirilis pada 2019 menunjukkan bahwa Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan. Kemampuan siswa Indonesia dalam membaca meraih skor rata-rata yakni 371, dengan skor rata-rata OECD yakni 487; matematika mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487; dan sains mencapai 389 dengan skor rata-rata OECD yakni 489 (Kemendikbud, 2019). Dengan data tersebut, dapat dinyatakan bahwa Indonesia masih berada diperingkat bawah, bahkan belum dapat mencapai rata-rata OECD. Terlebih, hasil studi baseline INOVASI pada 4 provinsi mitranya ditahun 2018 menunjukkan tingginya persentase siswa sekolah dasar kelas 1-3 yang tidak lulus dalam tes kemampuan literasi dasar (Harususilo, 2019). Hal ini meningkatkan urgensi dari peningkatan mutu pendidikan serta tenaga pendidik untuk dapat menghasilkan hasil pembelajaran yang maksimal dalam Literasi dan Numerasi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sepuluh artikel jurnal penelitian terdahulu. Adapun penulis dari masing-masing artikel tersebut adalah (Nazar, Chaudhry, Ali, & Faheem, 2018), (Abidin, 2016), (Ramadhina, Rezasyah, & Yulianti, 2019), (Rondonuwu, Mamentu, & Tulung, 2019), (Webb, Holfrod, Hodge, & Waller, 2017), (Mendy & Widodo, 2018), (Sutanto, 2017), (Kusanagi, 2020), (Lobo, Guntur, & Nalley, 2018), (Dewi, Rahmatunnisa, Sumaryana, & Kristiadi, 2018). Artikel-artikel jurnal ini seluruhnya membahas mengenai pentingnya peningkatan kualitas pendidikan demi kemaslahatan manusia dan untuk menunjang pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan yang baik juga dapat menjadi instrumen pembangunan dalam sektor lain seperti kesehatan, kemiskinan, hingga lingkungan. Dijelaskan juga pentingnya kerjasama dalam bidang pendidikan untuk mengetasi isu-isu pendidikan yang sulit diselesaikan secara domestik serta untuk menjaga keseimbangan antar negara. Sayangnya, dari sepuluh penelitian terdahulu yang penulis gunakan, belum terdapat artikel jurnal yang membahas mengenai keterkaitan tujuan dan targer *Sustainable Development Goals* dalam bidang pendidikan dengan kerjasama antar negara dalam bidang pendidikan khususnya Indonesia dengan Australia. sepuluh penelitian terdahulu ini kemudian akan dijelaskan secara terperinci pada bab selanjutnya.

I.2. Rumusan Masalah

Perbedaan kondisi geografis, sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi pembangunan di beberapa provinsi khususnya kawasan Indonesia bagian timur. Tidak hanya dalam segi pembangunan, dalam bidang pendidikan pun masih terdapat ketimpangan yang sangat jauh. Hal ini dapat dibuktikan dari tingginya angka buta huruf di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya Nusa Tenggara Barat. NTB telah menjadi mitra pertama dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia melalui INOVASI untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dalam segi tenaga pendidik maupun sistem yang digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal dalam pemahaman Literasi dan Numerasi (baca, tulis, hitung) yang tertuang pada target 4.6 SDGs.

Sejak 2016, INOVASI di NTB telah berkolaborasi dengan LSM dan organisasi kemasyarakatan berupa bantuan dana hibah dan kemitraan belajar untuk memperbaiki kualitas sistem pendidikan yang sesuai dengan daerah tersebut. Setelah berjalan satu periode, kerjasama ini nyatanya belum mampu menurunkan tingkat buta huruf di NTB secara signifikan, serta belum dapat mengantarkan siswa Indonesia bersaing di tingkat global menurut penilaian PISA. Bahkan pada 2016-2019, tingkat buta huruf di NTB menunjukkan hasil yang stagnan. Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat kesenjangan antara *Das Solen* dengan *Das Sein* hal ini kemudian memunculkan pertanyaan masalah: “Bagaimana penerapan kerjasama Indonesia – Australia melalui program INOVASI di Nusa Tenggara Barat dapat dijadikan sebagai instrumen tercapainya SDGs target 4.6 di Indonesia periode 2016-2019?”

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kerjasama Indonesia – Australia dalam bidang pendidikan dapat dijadikan instrumen pembangunan global yang terkandung dalam *Sustainable Development Goals* tujuan 4 rancangan PBB di Indonesia.

I.4. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat akademis:** Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan seputar pentingnya pendidikan dan memberikan informasi kerjasama dibidang pendidikan sebagai upaya melaksanakan pembangunan global. Serta untuk memperkaya literatur Hubungan Internasional.
2. **Manfaat praktis:** Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi kajian Hubungan Internasional dalam bidang pendidikan khususnya kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Australia. Penelitian ini juga diharapkan dapat diaplikasikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga swadaya masyarakat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

I.5. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab I, penulis akan menjelaskan tentang latar belakang dari terjalannya kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang pendidikan melalui INOVASI. Selanjutnya, penulis juga menuliskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka terkait penelitian terdahulu yang serupa dan memiliki hubungan yang sama dengan dengan topik penulis yang kemudian dijadikan sebagai acuan penulis dalam penelitian. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka berupa artikel jurnal ilmiah. Dalam bab ini juga terdapat landasan teori dan konsep untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian terkait.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data guna mengumpulkan informasi-informasi mengenai topik pembahasan. Selain itu, pada bab ini penulis juga menjabarkan jadwal serta tempat penelitian penulis.

BAB IV SDGs dan Kerjasama Indonesia-Australia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Nusa Tenggara Barat

Bab ini berisikan fakta-fakta mengenai kondisi pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelum diterapkannya Kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang pendidikan. Penulis juga menambahkan data mengenai indikator SDGs targer 4.6 yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya pencapaian peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat terutama keterampilan literasi dan numerasi.

BAB V Analisis Penerapan Kerjasama Indonesia-Australia Melalui INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapat Dijadikan Instrumen Pencapaian SDGs Target 4.6 di Indonesia

Bab ini berisikan perkembangan kerjasama antara Indonesia-Australia melalui program INOVASI pada tahun 2016-2019 yang terfokus pada penerapan kerjasama tersebut di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, penulis juga menganalisis perkembangan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat setelah dilakukan kerjasama tersebut serta menganalisis kaitan kerjasama tersebut dengan upaya pencapaian SDGs tujuan 4 di Indonesia.

BAB VI Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.